

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI PROVINSI PAPUA PERIODE 2006-2016

Irfan Eko Saputera

Ilmu Ekonomi / Fakultas Bisnis dan Ekonomika

irfanekosaputra@gmail.com

Abstrak - Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model statistik untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua berdasarkan data dari Belanja Pemerintah, Tingkat Pengangguran, dan Inflasi periode 2006 hingga 2016. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Belanja Pemerintah, Tingkat Pengangguran, dan Inflasi dengan variabel terikat yaitu Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik Indonesia dan Bank Indonesia. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di berbagai daerah maupun negara lain. Berdasarkan uji empiris yang dilakukan menunjukkan bahwa Belanja Pemerintah berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua sedangkan Tingkat Pengangguran dan Inflasi berpengaruh Positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua.

Kata Kunci : *Belanja Pemerintah, Tingkat Pengangguran, Inflasi, dan Tingkat Kemiskinan*

Abstract - *This research uses quantitative approach with statistical model to test factors influencing Poverty Level in Papua Province based on data from Government Expenditure, Unemployment Rate and Inflation in period 2006 until 2016. The independent variables in this research are Government Expenditure, Unemployment Rate , and Inflation with dependent variable that is Poverty Level in Papua Province. The data used in this research is obtained from the official website of Indonesian Central Bureau of Statistics and Bank Indonesia. This study refers to research that has been done previously in various regions and other countries. Based on empirical test conducted shows that Government Expenditure negatively affect Poverty Level in Papua Province while Unemployment and Inflation Rate Positive Influence to level of poverty in Papua Province.*

Keywords : *Government Expenditure, Unemployment Rate, Inflation, and Poverty Rate*

PENDAHULUAN

BPS (2008) berpendapat bahwa Kemiskinan adalah masalah yang kompleks karena memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai aspek kehidupan baik sosial, budaya, ekonomi dan aspek lainnya. Di Indonesia kemiskinan sudah menjadi isu utama dalam perekonomian Indonesia. Di setiap era pemerintahan telah dilakukan berbagai macam strategi pengentasan kemiskinan seperti menyediakan kebutuhan pangan, pendidikan, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan pertanian. Tujuannya agar mampu untuk menciptakan kehidupan yang layak dan bisa mensejahterakan penduduk Indonesia. Pembangunan ekonomi memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan, oleh karena itu pembangunan ekonomi harus dilakukan dengan perencanaan dan tahapan-tahapan yang matang, dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat dan dilakukan secara terpadu.

Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain: (1) terpenuhinya kebutuhan pangan; (2) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan; (3) rasa aman dari perlakuan dan ancaman tindak kekerasan; (4) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Di Indonesia tingkat kemiskinan terparah terjadi di bagian Timur wilayah Indonesia. World Bank (2007) mengemukakan, bahkan setelah dikontrol dengan karakteristik-karakteristik yang lain, wilayah Indonesia Timur masih memperlihatkan tingkat kemiskinan baik jumlah penduduk miskin maupun tingkat keparahan (dari segi pengeluaran) masih lebih tinggi dari wilayah lain di Indonesia.

Tabel 1
Tingkat kemiskinan di Pulau Papua 2014-2017
(Persen)

Tahun	Papua	Papua Barat
2013	31.53	27.14
2014	27.80	26.26
2015	28.40	25.73
2016	28.40	24.88
2017	27.62	25.10

Pada Tabel 1 dapat dilihat perbandingan antara tingkat miskin provinsi Papua dengan provinsi Papua Barat. Provinsi Papua dalam menanggulangi kemiskinan belum sepenuhnya berhasil. Ini dapat dilihat dari ketidakstabilan tingkat kemiskinan di provinsi Papua dari lima tahun terakhir.

Bagi suatu Negara yang sedang berkembang, pembangunan ekonomi merupakan instrumen untuk mencapai cita-cita nasionalnya. Salah satu indikator pengukur keberhasilan dari pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Perekonomian yang tumbuh akan mampu memberikan kesejahteraan ekonomi bagi penduduk suatu negara, oleh karena itu setiap negara berusaha untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonominya melalui berbagai kebijakan dalam perekonomian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian korelasional dimana metodenya menggunakan cara pengumpulan data untuk menentukan, apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih. Peneliti dapat mengetahui dan mengembangkan sesuai dengan tujuan penelitian (Sukardi, 2003), sedangkan pendekatan kuantitatif menekankan pada analisis pada data *numerical* (angka) yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 2011).

Lingkup penelitian ini adalah data kemiskinan di Provinsi Papua mulai tahun 2006-2016. Objek dari penelitian ini adalah Belanja Pemerintah, Inflasi, dan Pengangguran.

Model yang digunakan dalam penelitian ini merupakan adaptasi dari model penelitian terdahulu Irhamni (2017), sehingga didapat model sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu$$

Dimana :

Y = Tingkat kemiskinan di Provinsi Papua

α = Konstanta

β_{1-4} = Koefisien regresi

X_1 = Belanja Pemerintah

X_2 = Tingkat Pengangguran

X_3 = Inflasi

μ = error model

Teknik analisis yang dipilih untuk kepentingan ini adalah metode kuadrat terkecil atau Ordinary Least Square (OLS), sedangkan operasional pengolahan data dilakukan dengan software E-views. Metode OLS mempunyai beberapa keunggulan yaitu secara teknis sangat mudah dalam penarikan interpretasi dan perhitungan serta penaksiran BLUE (Best Linier Unbiased Estimator).

Pemilihan Model data runtut waktu (time series) berusaha untuk memprediksi masa depan dengan menggunakan data historis. Model ini membuat asumsi bahwa apa yang terjadi di masa depan merupakan fungsi dari apa yang terjadi di masa lalu. Dengan kata lain, model data runtut waktu (time series) mencoba melihat apa yang terjadi pada suatu kurun waktu tertentu dan menggunakan data runtut waktu masa lalu untuk memprediksi suatu kejadian di masa depan (Kuncoro, 2001).

Uji Hipotesis

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung. Uji t adalah pengujian variabel-variabel independen secara individu, digunakan untuk

menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji F dikenal dengan Uji serentak atau uji Model/Uji Anova, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen Belanja Pemerintah, pengangguran dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua. Pengujian ini akan memperlihatkan hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Koefisien determinasi adalah besarnya keragaman (informasi) di dalam variabel Y yang dapat diberikan oleh model regresi yang didapatkan. Nilai R^2 berkisar antara 0 s.d. 1. Apabila nilai R^2 dikalikan 100%, maka hal ini menunjukkan persentase keragaman (informasi) di dalam variabel Y yang dapat diberikan oleh model regresi yang didapatkan. Semakin besar nilai R^2 semakin baik model regresi yang diperoleh (Kurniawan, 2008).

Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2013), uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal. Normalitas dalam statistik parametrik seperti regresi dan Anova merupakan syarat pertama. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid atau bias terutama untuk sampel kecil.

Menurut Ghozali (2013), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar satu atau semua variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas atau tidak terjadi multikolinear.

Uji linearitas merupakan analisis statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat bersifat linear atau tidak (Ali Muhson, 2015). Apabila nilai probabilitas F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka model regresi memenuhi asumsi linearitas dan sebaliknya, apabila nilai probabilitas F hitung lebih kecil dari 0,05 maka model tidak memenuhi asumsi linieritas. Nilai Probabilitas F hitung dilihat pada baris F-tatistic kolom Probability.

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana faktor gangguan (variabel bebas) tidak memiliki nilai varian yang sama, sedangkan asumsi yang dipenuhi dalam regresi linear klasik adalah mempunyai nilai varian yang sama (konstan)/homoskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas akan muncul apabila variabel pengganggu memiliki varian yang berbeda dari satu observasi ke observasi lain. Jika varians tidak berubah maka disebut homokesdasitas dan jika tidak disebut heterokesdasitas (Ariefianto, 2012). Adanya heteroskedastis menyebabkan estimasi koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil regresi OLS dengan menggunakan aplikasi *E-views* 9 adalah sebagai berikut :

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
BP	-9.21E-13	1.36E-13	-6.767278	0.0000
P	1.425489	0.522290	2.729308	0.0094
INF	0.070478	0.022949	3.071068	0.0038
C	8.230947	0.699060	11.77430	0.0000

Hasil Regresi yang disajikan dalam Tabel diatas, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut :

$$K = 8.230947 - 9.21E-13 \text{ BP} + 1.425489 \text{ P} + 0.070478 \text{ INF} + e$$

Nilai Belanja Pemerintah Provinsi Papua dari koefisien regresi sebesar $-9.21E-13$, artinya jika Belanja Pemerintah mengalami kenaikan sebesar 1 persen akan menurunkan Tingkat Kemiskinan sebesar $9.21E-13$ persen.

Nilai Pengangguran Provinsi Papua dari koefisien regresi sebesar 1.408073 , yang artinya kenaikan Tingkat Pengangguran sebesar 1% akan menaikkan Tingkat Kemiskinan sebesar 1.425489 persen.

Nilai Inflasi Provinsi Papua dari koefisien regresi sebesar 0.070478 , yang artinya kenaikan tingkat Inflasi sebesar 1% akan meningkatkan juga Tingkat Kemiskinan sebesar 0.070478 persen.

Dengan menggunakan derajat kesalahan 5% hasil pengujian signifikansi parsial dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Nilai probabilitas uji t untuk variabel Belanja Pemerintah sebesar 0.0000 atau sebesar 0% . Nilai ini lebih kecil dari derajat kesalahan 5% sehingga dapat diartikan bahwa variabel Belanja Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua. (H_0 : ditolak)
- b. Nilai probabilitas uji t untuk variabel Tingkat Pengangguran 0.0094 atau sebesar $0,94\%$. Nilai ini lebih kecil dari derajat kesalahan 5% sehingga dapat diartikan bahwa variabel Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua. (H_0 : ditolak)
- c. Nilai probabilitas uji t untuk variabel Inflasi 0.0038 atau sebesar 0.38% . Nilai ini lebih kecil dari derajat kesalahan 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua. (H_0 : ditolak)

Uji F Signifikansi Simultan	
R-squared	0.804430
Adjusted R-squared	0.789762
F-statistic	54.84349
Prob(F-statistic)	0.000000

Dapat dilihat bahwa nilai F hitung adalah sebesar 54.84349 dengan probabilitas 0.0000 yang lebih kecil daripada tingkat signifikansi yang sebesar 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh Belanja Pemerintah (BP), Pengangguran (P), dan Inflasi (INF) terhadap Tingkat Kemiskinan (K).

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh nilai R-squared dari 3 variabel dependen yaitu Belanja Pemerintah, Tingkat Pengangguran, dan Inflasi sebesar 0.804430. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa kemampuan variabel independen (BP, P, dan INF) dalam menjelaskan variabel dependen (K) sebesar 80,4430% dan 19,557% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dianalisis pada penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan pada hasil pengujian normalitas Jarque-Bera menggunakan derajat kesalahan 5% maka ditarik kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal berdasarkan nilai probabilitas Jarque-Bera yang lebih besar daripada derajat kesalahan sebesar $5\% > \alpha$ atau 0,580371, Sehingga H_0 diterima.

Dari hasil uji multikolinearitas diperoleh hasil nilai VIF variabel BP, P, INF lebih kecil dari 10, maka dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas dalam model ini.

Nilai Prob. F_{hitung} dapat dilihat pada baris F-statistic kolom Probability. Pada kasus ini nilainya 0.2341 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi linieritas.

Dari Uji *Harvey* yang telah dilakukan, didapatkan hasil nilai Prob Chi² sebesar 0.0717. Karena nilai Prob lebih besar dari tingkat alpha (0.05), maka model tidak terjadi heterokedastisitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Variabel Belanja Pemerintah memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap variabel terikat yaitu Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua. Jika Belanja Pemerintah mengalami kenaikan sebesar 1 persen akan menurunkan Tingkat Kemiskinan sebesar 9.21E-13 persen.

Variabel Pengangguran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua. Bila Tingkat Pengangguran naik sebesar 1% maka akan mengakibatkan Tingkat Kemiskinan meningkat juga sebesar 1.425489 persen.

Variabel Inflasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua. Jika Inflasi naik sebesar 1% akan meningkatkan juga Tingkat Kemiskinan sebesar 0.070478 persen.

Saran

1. Penelitian Selanjutnya diharapkan mampu meneliti menggunakan variabel – variabel lain diluar variabel yang telah diteliti dalam penelitian ini.
2. Dari hasil yang diperoleh bahwa Belanja Pemerintah dapat menurunkan Kemiskinan, diharapkan pemerintah Provinsi Papua terus berupaya untuk meningkatkan jumlah Belanja Pemerintah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Papua, sehingga dapat menekan Tingkat Kemiskinan sekecil mungkin.
3. Jumlah pengangguran berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan di Provinsi Papua, sehingga pemerintah Provinsi Papua harus mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat Papua agar kesejahteraan meningkat.

4. Inflasi juga merupakan hal yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, jadi diharapkan pemerintah Provinsi Papua agar dapat mengatasi Inflasi dengan kebijakan-kebijakan yang ada.

DAFTAR PUTAKA

- Azwar, Saifuddin. 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bappenas. 2004. *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta.
- BPS, 2008. *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan*. Jakarta.
- Ghozali, Imam 2013. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika : Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EVIEWS 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kuncoro, Mudrajad. 2001. *Metode Kuantitatif : Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : UPP-AMP YKPN.
- Muhson, Ali. 2015. *Pedoman Praktikum Aplikasi Komputer Lanjut*. Fakultas Ekonomi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sukardi. 2003. *Metodelogi penelitian pendidikan*. Jakarta: Bumi Askara.
- World Bank, 2007. *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*.